



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NJOMAN SURJANA DANAPUTRA
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 209620

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 5.650.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/195 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
5. Bangunan Seluas 17 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 1.815.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV TURBO PRESTIGE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKKAR ULTIMATE 4X2 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 655.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 2.011.506.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.530.830.697
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.635.950.908
F. HARTA LAINNYA	Rp.	350.000.000
Sub Total	Rp.	16.993.287.605
III. HUTANG	Rp.	277.512.592
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.715.775.013

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.